

Peningkatan Akurasi Data Wajib Pajak Melalui Implementasi *Double Checking* Portal NIK pada UPTD Kuta Selatan

Increasing the Accuracy of Taxpayer Data Through the Implementation of Double Checking NIK Portal at UPTD South Kuta

Kadek Rai Mita Rosita Dewi*, Putu Indah Dianti Putri

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

*Email: raimitarositadewi@gmail.com

(Diterima 10-08-2024; Disetujui 17-09-2024)

ABSTRAK

Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Badung merupakan suatu kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Badung yang dirancang terintegrasi dalam satu area. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sehingga Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA bertanggung jawab atas pembayaran pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Namun, Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA masih memiliki kendala dalam hal keterbatasan pemahaman dan juga kemampuan dalam implementasi *double checking* portal NIK pada data wajib pajak sehingga menyebabkan kurangnya peningkatan akurasi pada data Wajib Pajak atau WP. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pendampingan kepada staf *double checking* dengan menggunakan sistem berbasis web portal. Metode pengabdian yang dilakukan adalah dalam bentuk pelatihan dan juga pendampingan dengan pemberian materi, bantuan pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian ini yaitu guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan staf *double checking* dalam hal peningkatan akurasi pada data Wajib Pajak atau WP dengan implementasi *double checking* portal NIK. Adapun saran yang dilakukan agar peningkatan akurasi data Wajib Pajak melalui implementasi *double checking* portal NIK pada UPTD Kuta Selatan yaitu dengan cara memanfaatkan dengan baik kecanggihan teknologi masa kini ada baiknya sistem yang digunakan dimodifikasi dengan sistem berbasis Informasi teknologi atau IT.

Kata kunci: Pendampingan, pelaporan *double checking*, portal NIK, akurasi data wajib pajak

ABSTRACT

The Badung Regency Government Center (PUSPEM) is a Badung Regency government office area which is designed to be integrated in one area. With the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies as an effort to realize broad, real and responsible regional autonomy. So the Regional Revenue Agency or BAPENDA is responsible for paying PBB-P2 tax (Rural and Urban Land and Building Tax). However, the Regional Revenue Agency or BAPENDA still has problems in terms of limited understanding and ability in implementing *double checking* of the NIK portal on taxpayer data, resulting in a low increase in accuracy in Taxpayer or WP data. The aim of this service activity is to provide dual-proof staff assistance by using a web portal-based system. The method of service carried out is in the form of training and also mentoring by providing materials, reporting assistance, monitoring and evaluation. The result of this service activity is to increase the understanding and ability of *double checking* staff in terms of increasing accuracy in Taxpayer or WP data by implementing the NIK *double checking* portal. The suggestion made is to increase the accuracy of Taxpayer data through the implementation of the NIK *double checking* portal at the South Kuta UPTD, namely by making good use of today's technological sophistication, it is a good idea to modify the system used with an Information Technology or IT based system.

Keywords: Additional, *double checking* reporting, NIK portal, accuracy of taxable data

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) telah memberikan pengaruh yang luas terhadap peradaban manusia saat ini, khususnya dalam dunia akuntansi, dengan jarak yang semakin dekat dan kebutuhan akan informasi yang semakin cepat, maka kompetensi

akuntan harus terus dikembangkan mengikuti trend teknologi informasi yang ada (Fauzi et al., 2022). Dalam bidang akuntansi, banyak ditawarkan sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer dengan tujuan untuk memudahkan akuntan menghasilkan informasi yang andal, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji (Rayuwati, 2016). Perkembangan sistem informasi dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan dan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang maju semakin banyak dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan manusia di berbagai bidang (Metandi, 2019). Pendidikan juga menjadi salah satu indikator penilaian *Human Development Indeks* (HDI), yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu indeks pembangunan manusia disuatu negara (Kuat, 2016). Hal ini dilakukan untuk mendorong tercapainya tingkat keahlian profesional tertentu dan untuk memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan kompetensi yang dipilih oleh peserta didik di dunia kerja (Neliwati et al., 2023).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Badung merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tujuan pokok dan fungsi mengelola pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah (Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung, 2022). Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang mempunyai fungsi dan peran utama di bidang pengelolaan perpajakan dan juga pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Karyawan dan beberapa karyawan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung (PUSPEM) terkait implementasi *double checking* portal NIK, penulis menemukan adanya permasalahan dalam peningkatan akurasi data Wajib Pajak melalui implementasi *double checking* portal NIK pada UPTD Kuta Selatan. Dimana para Wajib Pajak sering sekali tidak sengaja salah meng-*input* data yang sudah terlampir pada KK/KTP/NPWP pada *form*. Kesalahan pada data seperti ini bisa berujung fatal apabila tidak dilakukannya *double checking* pada portal NIK. Jika terdapat kesalahan pada data maka akan berakibat pada kesalahan data mutasi hasil pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB - P2.

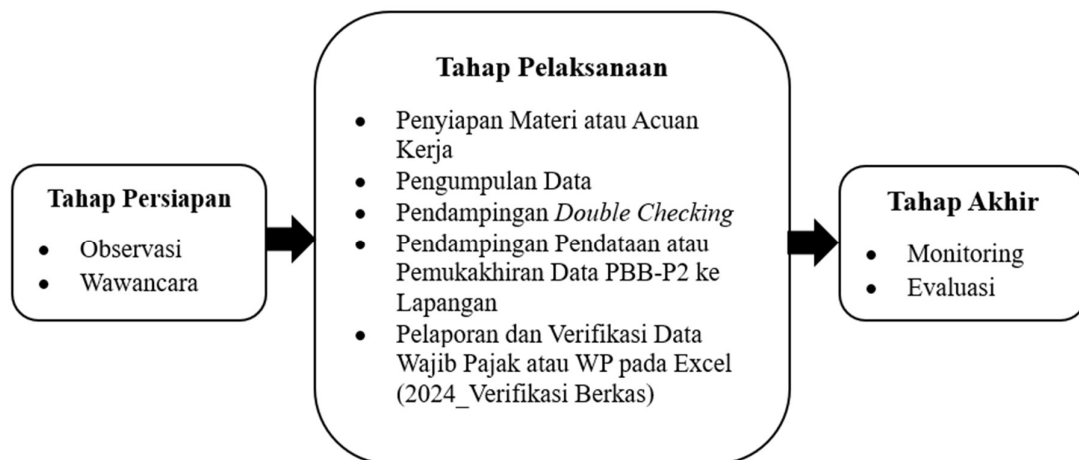
Adapun solusi yang sekiranya dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung (PUSPEM) terkait pengaplikasian *double checking* portal NIK yaitu sebaiknya diadakan sistem pengecekan otomatis berbasis sistem atau IT. Dikarenakan pada sistem yang sekarang masih menggunakan berkas data

Wajib Pajak berupa *form* atau lembar kertas data. Pengecekan dengan cara manual melalui *form* atau lembar kertas data ini memiliki banyak kekurangan, apabila pengecekan *double checking* portal NIK dilakukan dengan sistem atau IT dapat lebih mudah dilaksanakan untuk diimplementasikan di kantor pelayanan dan juga dapat menghemat waktu kerja bagi petugas *double checking* portal NIK.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai “Peningkatan Akurasi Data Wajib Pajak Melalui Implementasi *Double Checking* Portal NIK pada UPTD Kuta Selatan”. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai peranan dari menerapkan pengaplikasian *double checking* portal NIK terhadap peningkatan akurasi data Wajib Pajak pada UPTD Kuta Selatan.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan ini dilakukan mulai bulan 10 Juni 2024 sampai dengan 9 Agustus 2024. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada staff *double checking* pada bagian implementasi *double checking* portal NIK guna meningkatkan akurasi data Wajib Pajak. Kegiatan ini dilakukan di Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Badung Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) khususnya pada UPTD Kuta Selatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diselenggarakan guna meningkatkan akurasi data Wajib Pajak dengan melaksanakan implementasi *double checking* dengan web portal NIK.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan staff *double checking* UPTD Kuta Selatan khususnya pada Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA dengan pelatihan, pendampingan serta transfer pengetahuan dan sumber daya

yang diperlukan agar staff *double checking* yang menjadi pihak sasaran dapat secara mandiri mengatasi dan menghadapi tantangan perluasan akses terhadap teknologi modern khususnya dalam implementasi *double checking* portal NIK dalam peningkatan akurasi data wajib pajak. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 1, dalam upaya mencapai tujuan luaran yang telah direncanakan diantaranya termasuk dalam tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir yang diuraikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Uraian Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan	Metode	Uraian Pelaksanaan
Tahap Persiapan		
1. Observasi	Pengamatan pelayanan Sub Bagian <i>double checking</i> berbasis portal NIK kepada Wajib Pajak.	Observasi berupa pengamatan terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh Sub Bagian <i>double checking</i> berbasis portal NIK kepada Wajib Pajak. Observasi ini menjadi salah satu tahap awal dari menemukan permasalahan.
2. Wawancara	Pendekatan kepada Kepala Sub. Bagian <i>double checking</i> berbasis portal NIK dan beberapa karyawan di pada UPTD Kuta Selatan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi.	Melaksanakan wawancara kepada Kepala Sub. Bagian <i>double checking</i> berbasis portal NIK terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi serta melakukan wawancara untuk memperoleh masukan terhadap perbaikan sistem <i>double checking</i> berbasis portal NIK. Selain itu wawancara dilakukan dengan para Wajib Pajak guna mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan yang menjadi kendala pada saat Wajib Pajak melakukan <i>double checking</i> berbasis portal NIK.
Tahap Pelaksanaan		
1. Penyiapan Materi atau Acuan Kerja	Menggunakan metode <i>powerpoint</i> atau PPT untuk menyampaikan materi presentasi guna memberikan edukasi terhadap Wajib Pajak dalam meningkatkan akurasi data.	Menyiapkan materi presentasi berupa <i>powerpoint</i> atau PPT yang memuat pentingnya <i>double checking</i> dengan sistem portal NIK guna meningkatkan akurasi data pada Wajib Pajak. Hal ini guna mengedukasi para Wajib Pajak untuk melakukan <i>double checking</i> agar tidak terjadi kesalahan pada data sehingga nantinya mutasi pajak juga tidak terjadi salah data.
2. Pengumpulan Data	Menggunakan indikator kinerja beralur pada pengumpulan data Wajib Pajak, yang dimana berisikan berkas yang wajib untuk dilengkapi guna meningkatkan akurasi pada data.	Indikator kinerja beralur pada pengumpulan data Wajib Pajak pada UPTD Kuta Selatan. Terdapat berkas yang wajib di <i>input</i> oleh Wajib Pajak guna meningkatkan akurasi pada data Wajib Pajak atau pemohon.
3. Pendampingan <i>Double Checking</i>	Pendampingan <i>double checking</i> dilaksanakan dengan memantau hasil berkas yang telah di input oleh Wajib Pajak.	Pendampingan <i>double checking</i> dilaksanakan dengan memantau hasil berkas yang telah di <i>input</i> oleh Wajib Pajak. Kemudian apabila terdapat kesalahan data, petugas pengecekan dapat melakukan perbaikan terhadap data Wajib Pajak.
4. Pendampingan Pendataan atau Pemukakhiran Data	Melaksanakan pendataan atau pemutakhiran data PBB-P2 bertempat di daerah Kuta Selatan	Pendampingan pendataan atau pemutakhiran data PBB-P2 yang bertempat pada daerah Kuta Selatan. Setelah melaksanakan pendampingan dapat dilaksanakan analisis

PBB-P2 Lapangan	ke dan melaksanakan hasil monitoring.	analisis dari hasil dari monitoring dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pendataan atau pemutakhiran data PBB-P2 yang bertempat pada daerah Kuta Selatan.
5. Pelaporan dan Verifikasi Data Wajib Pajak pada Excel (2024_Verifikasi Berkas)	Petugas pelaporan meng- <i>input</i> data Wajib Pajak pada Excel guna mendata berkas yang telah ditetapkan.	Pelaporan dan verifikasi data Wajib Pajak dilaksanakan pada excel dengan judul (2024_Verifikasi Berkas). Petugas pelaporan meng- <i>input</i> beberapa hal yang terdapat pada lembar mutasi yang telah melewati proses <i>double checking</i> dengan sistem portal NIK guna mendata berkas yang telah ditetapkan.
Tahap Akhir		
1. Monitoring	Monitoring dilakukan dengan cara memantau pemahaman <i>staff double checking</i> terkait implementasi, melakukan tinjauan berkala terhadap materi, dan mengidentifikasi kebutuhan para terkait pendampingan.	Bentuk kegiatan monitoring yang dilakukan yaitu memantau pemahaman <i>staff double checking</i> tentang implementasi <i>double checking</i> portal NIK dan kemampuan dalam menggunakan <i>web</i> portal guna melakukan <i>double checking</i> pada data Wajib Pajak, melakukan tinjauan berkala terhadap materi dan metode yang digunakan dalam pendampingan, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para <i>staff double checking</i> terkait pendampingan yang dilakukan.
2. Evaluasi	Evaluasi yang diberikan kepada <i>staff double checking</i> mengacu pada indikator atau tolak ukur keberhasilan kegiatan.	Dari evaluasi dapat dilihat ketercapaian dari pemahaman maupun penanganan terhadap kendala yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan melalui pendekatan sistem berbasis portal NIK. Tahap evaluasi ini dilakukan pada tahap akhir setelah dilakukan kegiatan monitoring. Evaluasi yang diberikan kepada <i>staff double checking</i> mengacu pada indikator atau tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

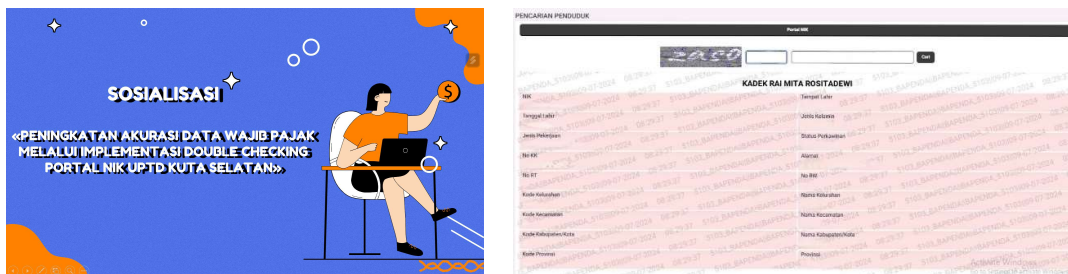
1. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap awal melibatkan kegiatan observasi dan juga pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh Sub Bagian *double checking* berbasis portal NIK kepada Wajib. Wawancara juga dilakukan kepada Kepala Sub. Bagian *double checking* berbasis portal NIK dan beberapa karyawan di Badan Pendapatan Daerah khususnya pada UPTD Kuta Selatan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi serta melakukan wawancara untuk memperoleh masukan terhadap perbaikan sistem *double checking* berbasis portal NIK seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Wawancara *Double Checking* Portal NIK kepada Wajib Pajak

Kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu penulis juga menyiapkan materi presentasi berupa *powerpoint* atau PPT yang memuat pentingnya *double checking* dengan sistem portal NIK guna meningkatkan akurasi data pada Wajib Pajak. Hal ini guna mengedukasi para Wajib Pajak untuk melakukan *double checking* agar tidak terjadi kesalahan pada data sehingga nantinya mutasi pajak juga tidak terjadi salah data seperti yang sudah diuraikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi terkait Peningkatan Akurasi Data Wajib Pajak Melalui Implementasi *Double Checking* Portal NIK

Selanjutnya pada tahap pengumpulan data, adapun berkas atau *form* kosong yang wajib di *input* oleh Wajib Pajak, dimana terdapat *form* Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB, terdapat Surat Pemberitahuan Objek Pajak, dan juga terdapat Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang dapat ditunjukkan pada Gambar 4.

The image displays three forms used in the tax mutation process. On the left is a cover sheet for the mutation of tax object/subject. In the center is the 'SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK' (Tax Object Notification Letter) form, which includes sections for taxpayer information, object details, and a list of related parties. On the right is the 'LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK' (Attachment of Tax Object Notification Letter) form, which provides a detailed list of related parties and their identification numbers.

Gambar 4. Form Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Selanjutnya penulis juga melaksanakan kegiatan pendampingan pendataan atau pemutakhiran data PBB-P2 yang bertempat pada daerah Kuta Selatan sehingga tahap pelaksanaan monitoring kunjungan lapangan telah terlaksana. Setelah melaksanakan pendampingan pada kunjungan lapangan, penulis menganalisis hasil dari monitoring tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pendataan atau pemutakhiran data PBB-P2 yang bertempat pada daerah Kuta Selatan dengan file excel (2024_Verifikasi Berkas) seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Pendampingan Pendataan atau Pemutakhiran Data PBB-P2 yang Bertempat pada Daerah Kuta Selatan

Yang terakhir yaitu terdapat tahap monitoring yang dilakukan selama proses pendampingan *double checking* portal NIK. Adapun bentuk kegiatan monitoring yang dilakukan yaitu dengan cara memantau pemahaman *staff double checking* tentang implementasi *double checking* portal NIK dan kemampuan dalam menggunakan web portal guna melakukan *double checking* pada data Wajib Pajak, melakukan tinjauan berkala terhadap materi dan metode yang digunakan dalam pendampingan, dan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para *staff double checking* terkait pendampingan yang dilakukan.

Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian, penulis melihat ketercapaian dari pemahaman maupun penanganan terhadap kendala yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan melalui pendekatan sistem berbasis portal NIK. Adapun ruang lingkupnya mencakup pengecekan data pribadi Wajib Pajak pada Sub Bagian *double checking* berbasis portal NIK Badan Pendapatan Daerah khususnya pada UPTD Kuta Selatan.

2. Hasil Ketercapaian Kegiatan

Secara umum, hasil ketercapaian kegiatan dapat diukur dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah kegiatan pengabdian, menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Putri, 2024). Keberhasilan kegiatan pengabdian ini dirinci atau diuraikan pada Tabel 2. Sebelum kegiatan pengabdian, sering terjadi kesalahan dalam pendataan, efisiensi waktu terhambat, serta tingkat kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dalam menjalankan prosedur *double checking* masih rendah. Setelah kegiatan pengabdian, terdapat perbaikan signifikan dalam mengurangi potensi kesalahan, peningkatan efisiensi waktu dalam pendataan, serta peningkatan kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak terhadap prosedur *double checking* menggunakan web portal NIK. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *double checking* berhasil meningkatkan akurasi dan keandalan data Wajib Pajak.

Tabel 2. Hasil Ketercapaian Kegiatan Pengabdian

Indikator Keberhasilan	Sebelum Kegiatan Pengabdian	Sesudah Kegiatan Pengabdian
Pengurangan kesalahan pengaplikasian <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK.	potensi dalam <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK. Sering terdapat potensi kesalahan dalam pendataan data Wajib Pajak.	Terdapat pembetulan potensi kesalahan dalam pendataan data Wajib Pajak dengan sistem <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK.
Efisiensi waktu dalam pengaplikasian <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK.	Pendataan data Wajib Pajak seringkali terhambat dikarenakan terdapat kesalahan pada hasil mutasi Wajib Pajak.	Pendataan data wajib pajak menggunakan sistem <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK dapat diselesaikan pada tanggal yang sudah ditentukan.
Kepatuhan menjalankan prosedur menggunakan <i>double checking</i> web portal NIK.	Wajib Pajak belum patuh dalam menjalankan prosedur <i>double checking</i> dikarenakan kurangnya pemahaman pada sistem <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK.	Wajib Pajak sudah dapat mengikuti dan juga mendapatkan pengetahuan terkait tata cara dan juga prosedur sistem <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK.
Ketaatan Wajib Pajak turut serta dalam menjalankan pengaplikasian <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK.	Wajib Pajak belum taat dalam menjalankan pengaplikasian <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK.	Wajib Pajak sudah mengikuti prosedur pengaplikasian <i>double checking</i> menggunakan web portal NIK guna meningkatkan akurasi data Wajib Pajak.

3. Solusi dari Permasalahan Pengabdian

Adapun upaya yang dilakukan agar peningkatan akurasi data Wajib Pajak melalui implementasi *double checking* portal NIK pada UPTD Kuta Selatan yaitu dengan cara memanfaatkan dengan baik kecanggihan teknologi masa kini ada baiknya sistem yang digunakan dimodifikasi dengan sistem berbasis Informasi Teknologi atau IT. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Jika tidak maka negara dan bangsa Indonesia akan tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang terus berkembang dengan pesat sekali, sehingga negara Indonesia akan selamanya terus menjadi berkembang bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi “negara gagal” (Barkatullah, 2019). Dengan menggunakan sistem IT ini, maka apabila terdapat kesalahan data yang di-*input* oleh Wajib Pajak akan langsung terdata dengan sistem IT. Jadi, sistem IT nantinya akan langsung men-*detect* apabila ada koreksi yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak. Dengan hal ini pula maka dapat menghemat waktu petugas *double checking* portal NIK dan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak cukup memantau melalui sistem IT apabila terdapat kesalahan data yang perlu diperbaiki atau dilengkapi.

Jika dalam pengecekan *double checking* portal NIK menggunakan sistem manual, hal ini kurang mampu dalam mengolah data dalam skala yang besar. Dengan kelemahan ini dapat mengurangi kemampuan organisasi untuk mengolah data dengan cepat dan akurat. Keamanan pada data juga sangat dapat dipengaruhi oleh peng-*inputan* data dengan sistem manual ini, dikarenakan sistem manual ini dapat kurang aman dalam pengolahan data. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecurangan dan manipulasi pada data. Upaya yang dapat digunakan dalam meningkatkan akurasi data Wajib Pajak melalui implementasi *double checking* portal NIK yaitu dengan menerapkan sistem *blockchain*. Penerapan teknologi *blockchain* pada sistem keamanan informasi membawa beberapa manfaat penting, seperti menyediakan solusi keamanan informasi yang kuat, memastikan integritas data, memungkinkan anonimitas bagi pengguna, membuat data dan transaksi transparan, dan memastikan keandalan dalam penyimpanan data (Elan Maulani et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui program pendampingan implementasi *double checking* portal NIK dalam upaya meningkatkan akurasi data Wajib Pajak pada UPTD Kuta Selatan telah berlangsung dengan baik dan juga lancar dimulai dari

tahap observasi, wawancara, penyiapan materi atau acuan kerja, pengumpulan data, pendampingan *double checking*, pendampingan pendataan atau pemukakhiran data PBB-P2 ke lapangan, pelaporan dan juga verifikasi data Wajib Pajak pada excel (2024_Verifikasi Berkas), monitoring hingga evaluasi. Melalui kegiatan pendampingan ini UPTD Kuta Selatan pada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda PUSPEM khususnya pada *staff double checking* sudah memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan dan juga alur kerja pada *double checking* serta *staff double checking* memiliki keterampilan dalam penggunaan sistem web berbasis portal. Implementasi *double checking* portal NIK dalam upaya meningkatkan akurasi data Wajib Pajak pada UPTD Kuta Selatan setelah dilakukannya kegiatan pengabdian ini dinilai sudah efisien, tepat waktu, akurat dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku (Oktarini et al., 2024).

Adapun saran yang dilakukan agar peningkatan akurasi data Wajib Pajak melalui implementasi *double checking* portal NIK pada UPTD Kuta Selatan yaitu dengan cara memanfaatkan dengan baik kecanggihan teknologi masa kini ada baiknya sistem yang digunakan dimodifikasi dengan sistem berbasis Informasi Teknologi atau IT. Dengan menggunakan sistem IT ini, maka apabila terdapat kesalahan data yang di-*input* oleh Wajib Pajak akan langsung terdata dengan sistem IT. Jadi, sistem IT nantinya akan langsung mendeteksi apabila ada koreksi yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak. Jika dalam pengecekan *double checking* portal NIK menggunakan sistem manual, hal ini kurang mampu dalam mengolah data dalam skala yang besar. Dengan kelemahan ini dapat mengurangi kemampuan organisasi untuk mengolah data dengan cepat dan akurat. Keamanan pada data juga sangat dapat dipengaruhi oleh peng-*inputan* data dengan sistem manual ini. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecurangan dan manipulasi pada data. Kecurangan, secara umum didefinisikan oleh *Webster's New World Dictionary* sebagai “*the intentional deception to cause a person to give up property or some lawful right*” (Septriani & Handayani, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. F. (2023). Program Peningkatan Kemampuan Mahasiswa Menghadapi Dunia Kerja Melalui Kegiatan Magang Di Kantor Imigrasi Dan Koperasi Sangosay Atambua. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 50–56. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v2i4.164>
- Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung. (2022). *Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung*. [https://bapenda.badungkab.go.id/storage/files/Profil Bapenda 2022.pdf](https://bapenda.badungkab.go.id/storage/files/Profil%20Bapenda%202022.pdf)
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bANUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P>

- P1&dq=minat+penggunaan+sistem+informasi+akuntansi+berbasis+%22e+commerce%22&ots=C2zQxDpKOY&sig=uaBj0wr-C9HPgl7JXE_6gl3So4A%0Ahttp://eprints.ulm.ac.id/3931/1/2. Buku Referensi Hukum Transaksi
- Elan Maulani, I., Herdianto, T., Febri Syawaludin, D., & Oga Laksana, M. (2023). Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(2), 99–102. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i2.634>
- Erni Sulindawati, N. L. G., Pertama Yudiantara, I. G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Model Pengelolaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Diploma III Untuk Memasuki Dunia Kerja. *Proceeding TEAM*, 2, 541. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.196>
- Fauzi, E., Sinatrya, M. V., Ramdhani, N. D., Muhammad, Z., & Safari, R. (2022). Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi Ruhuphy Ramadhan. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7, 190–190.
- Ismail, I., Hasan, H., & Musdalifah, M. (2018). Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Melalui Efektivitas Program Magang Kependidikan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 124–132. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v2i1.48>
- Kuat, T. (2016). Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Melalui Praktik Bisnis di Business Center (Studi Kasus: SMK Muhammadiyah 2 Surakarta). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 155–168. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/827>
- Metandi, F. (2019). Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Studi Kasus Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda). *Just TI (Jurnal Sains Terapan Teknologi Informasi)*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.46964/justti.v11i1.130>
- Neliwati, N., Khairani, K., & Tambak, S. P. (2023). Evaluasi Pengelolaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Kelas XI SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4), 2285–2313. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.2907>
- Oktarini, L. L., Putri, P. I. D., & Wedagama, D. A. T. (2024). Pendampingan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT . Grin Kar Indonesia Assistance for Article 23 Income Tax Reporting with E-Bupot Unification at PT . Grin Kar Indonesia. *Panrita Abdi*, 8(28), 1–10.
- Putri, P. I. D. & Sudiarta, I. K. (2024). Modernisasi Irigasi: Upaya Perluasan Akses Terhadap Teknologi Informasi dalam Mendukung Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. *Abdimas Galuh*, 6(1), 348-359.
- Rayuwati. (2016). Penerapan dan Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang Akuntansi dan Manajemen. *Warta*.
- Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Unique, A. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 0, 1–23.
- Yantu, I., Mahmud, M., Panigoro, M., & Nunu, N. P. (2023). Pengaruh Program Praktek Kerja Lapangan Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Akuntansi dan Lembaga di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 495–498.